

**EVALUASI PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN OLEH DINAS  
SOSIAL PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG MELALUI  
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) PELANGI**

**Oleh:**

Rosiana Faradisa, Dewi Rostyaningsih, Dyah Lituhayu

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kode Pos 1269

**ABSTRACT**

*Program of street children handling in Semarang city is based on the mayor's decree no. 462/133 of 2002 which is about the formation of the coordinating social problem's team. Street children handling program in this research through cooperation with Pelangi shelter. The purpose of the program is to preventing the child to stop doing the activity in the street. The evaluation models are used is the Single Program After-Only by Finterbusch and Motz. Evaluation of this program to see the result on street children handling programs will be viewed using criteria-criteria evaluation of policies according to Dunn are: effectiveness, efficiency, sufficiency, alignment, responsiveness, and accuracy. The barriers program that is viewed with achievement of each program according to the evaluation criteria of the policy by Dunn.*

*Street children handling program result by Social, Youth and Sport Services of Semarang City through Pelangi shelter where in this criteria evaluation, there are still five criterias judged not good, based on the effectiveness, efficiency, sufficiency, alignment, and responsiveness. On the accuracy activities is considered good. Barriers to programs such as lack of commitment from the Social, Youth and Sport Services of Semarang city and the Pelangi shelter making activity stalled in the middle of the road. Lack of mentoring and controlling is also a barrier to factor in this program. Overall many judgment that haven't been good on these evaluation criteria, then program which have run not been expressed successfully. Recommendations of this program, such as strengthening strategy and commitment of program implementor, assessment in detail on the balance between the time required and the volume of the service recipient, and continued assistance who receive benefits from the program.*

**Keyword : Evaluation, Policy, Street Children Handling**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sensus penduduk yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata pertambahan jumlah penduduk adalah 4,3 juta per tahun (2008-2011). Hal ini semakin memprihatinkan karena kenyataan bahwa hampir 2/3 dari penduduk perkampungan kumuh adalah anak-anak.

Akibat lebih jauh adalah banyak anak yang mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk membantu ekonomi keluarga. Tidak sedikit di antara mereka terpaksa meninggalkan sekolah guna mencari nafkah dengan hidup sebagai pengamen, pengemis, pedagang asongan, pemulung, atau penjual koran. Mereka yang berasal dari keluarga tak mampu menggantungkan hidupnya sebagai bocah lampu merah. Generasi yang terpaksa atau dipaksa mencari nafkah di jalanan, meski umur dan fisik mereka belum pantas untuk itu (BPS, 2005:87). Kenyataan dari kondisi inilah yang menyebabkan jumlah anak jalanan di kota-kota

besar menunjukkan peningkatan yang cukup tajam.

Selanjutnya oleh Shalahuddin (2004:72), dikelompokkan menjadi tiga faktor anak turun ke jalan :

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Lingkungan Sekitar
3. Faktor-faktor Lainnya

Perkembangan anak jalanan yang pesat di kota-kota besar juga dialami oleh Kota Semarang. Perkembangan anak jalanan di Kota Semarang mengalami kenaikan sebesar 10 persen dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Semarang yang terjadi tiap tahun seperti dan sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota No. 462/133 tahun 2002, mendorong Pemerintah melalui Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga untuk berupaya mengambil langkah penanganan anak jalanan yaitu melalui pendekatan *open house* (rumah terbuka) berupa rumah singgah atau yang sekarang telah diganti menjadi Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan

Olahraga Kota Semarang melalui RPSA yaitu:

1. Penanganan rehabilitatif yakni mengarahkan anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti, ataupun panti.
2. Penanganan pembinaan anak dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan.

Tujuan dari program penanganan anak jalanan ini adalah agar kegiatan anak di jalanan seperti mengamen, berjualan koran, menyemir sepatu, dan mengemis tidak lagi dilakukan. Dalam langkah pencapaian tujuan tersebut, Disospora melakukan penanganan anak jalanan melalui lembaga-lembaga sosial atau Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang masih aktif di Kota Semarang. RPSA Pelangi menjadi lokus yang dipilih sebagai tempat penelitian dalam program penanganan anak jalanan oleh Disospora Kota Semarang melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak karena RPSA Pelangi telah melaksanakan program penanganan dari Disospora. Selain itu, pejangkauan anak jalanan

di RPSA Pelangi paling luas dibandingkan dengan RPSA lainnya.

Dalam survey pendahuluan diketahui bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan yang mangkrak atau terhentinya kegiatan di tengah jalan.

Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi penanganan anak jalanan melalui RPSA yang dilakukan oleh Disospora. Dengan mengetahui kekurangan maupun hambatan-hambatan program, selanjutnya dapat dipergunakan sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kembali kebijakan atau penyesuaian dimasa yang akan datang.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hasil program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang melalui RPSA Pelangi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial,

Pemuda dan Olahraga Kota Semarang melalui RPSA Pelangi.

### 1.3 Tinjauan Teoritis

#### 1. Evaluasi Program

Definisi yang terkenal untuk evaluasi program yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (Arikunto,2007: 4), yang mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Kemudian evaluasi program juga dikemukakan oleh dua ahli evaluasi yaitu Cronbach dan Stufflebeam. Mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

#### 2. Model Evaluasi Program

Melakukan evaluasi menurut Finterbusch dan Motz dalam Subarsono (2010:128) terhadap program yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi, yakni:

1. *Single program after-only*,
2. *Single program before-after*,
3. *Comparative after-only*, dan
4. *Comparative before-after*.

Dari penjelasan beberapa model evaluasi, maka model *Single program after-only* yang dikemukakan oleh Finterbusch dan Motz dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi program. Alasannya adalah model penelitian ini mampu menggambarkan kondisi sasaran program setelah program selesai dilaksanakan, sehingga dapat mengetahui dan menggambarkan apakah hasil program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa kriteria, karena penggunaan kriteria yang tunggal akan membahayakan. Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003,610) mencakup enam kriteria yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

### 1.4 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe kualitatif. Subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*, dimana informan dalam

penelitian ini adalah Kasi Pelayanan Sosial/Staff Pelayanan Sosial Disospora Kota Semarang, Bendahara RPSA Pelangi, dan anak jalanan binaan RPSA Pelangi Kota Semarang. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara, dan data sekunder dari dokumen yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang terkumpul akan diinterpretasikan melalui reduksi data yaitu dengan memilih data- data yang penting dan akan digunakan. Data hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait dengan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

- a. Hasil Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga melalui RPSA Pelangi
  1. Efektivitas

Kegiatan Program Penanganan anak jalanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga melalui RPSA Pelangi yaitu kegiatan razia rutin, pelatihan perbengkelan, dan pemberian bantuan modal. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program penanganan anak jalanan ini adalah mengurangi aktivitas anak di jalan sehingga diharapkan nantinya Semarang bebas anak jalanan. Kenyataannya kegiatan yang telah dilaksanakan tidak membuat anak jalanan berhenti beraktivitas di jalan. Hasil dari kegiatan razia belum terlihat. Anak yang terjaring razia nyatanya tidak banyak berubah, sehingga masih banyak anak jalanan yang tidak hanya sekali terkena razia.

Kemudian untuk pelatihan perbengkelan permasalahan adalah setelah kegiatan ini selesai, diketahui tidak ada tindak lanjut dari Disospora apakah nantinya anak jalanan tersebut akan diberikan pekerjaan atau tidak. Sama halnya dengan bantuan gerobak dorong, tidak ada pendampingan mengakibatkan anak sering kembali ke jalan dan sulit untuk melakukan pengelolaan dana.

Kegiatan yang mangkrak yaitu dari kegiatan pemberian gerobak dorong tersebut membuat hasil dari kegiatan ini juga belum dapat dirasakan secara berkelanjutan.

## 2. Efisiensi

Jumlah pegawai dan kepengurusan dalam program penanganan anak jalanan belum tercukupi. Dalam program penanganan semacam ini, idealnya adalah 1:5. Artinya tiap personil atau pegawai seharusnya membina lima anak jalanan dalam satu kegiatan. Sarana dan prasarana juga belum optimal dimana untuk tempat penampungan anak setelah penjarangan dari kegiatan razia hanya terdapat satu panti rehabilitasi yaitu panti rehabilitasi Among Jiwo.

Usaha dalam pemenuhan komponen penanganan anak jalanan yang telah dilakukan oleh Disospora juga hanya pada kegiatan rehabilitasi dan pembinaan.

## 3. Kecukupan

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu adanya razia rutin, pelatihan perbengkelan, dan bantuan modal usaha berupa pemberian gerobak dorong dapat dikatakan bahwa

program penanganan anak jalanan ini belum memenuhi kriteria kecukupan dimana hasil dari program belum mampu memecahkan permasalahan anak jalanan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan dalam penelitian ini yaitu, pertama, keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, kesehatan anak jalanan yang buruk. Ketiga, partisipasi pendidikan anak jalanan rendah. Keempat, kondisi sosial, mental dan spiritual anak jalanan tidak kuat.

## 4. Perataan

Kegiatan yang telah terlaksana, pencapaian kriteria perataan dapat dinilai belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak terserapnya seluruh anak jalanan binaan RPSA Pelangi untuk seluruh kegiatan. Anak binaan RPSA terdiri dari berbagai tingkatan umur, mulai dari tujuh tahun hingga delapan belas tahun. Akan tetapi untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Disospora yaitu pelatihan perbengkelan dan pemberian modal usaha dengan gerobak dorong hanya dapat diikuti oleh anak jalanan yang sudah dianggap dewasa yaitu umur 10-18

tahun. Pelatihan perbengkelan sendiri hanya diikuti oleh anak laki-laki. Pemberian gerobak dorong saja hingga saat ini hanya dua orang saja yang bisa menjalankan bantuan usaha baru tersebut.

#### 5. Responsivitas

Kegiatan pada program penanganan anak jalanan oleh Disospora di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi dinilai belum mencapai kriteria responsivitas, dimana kebutuhan anak jalanan akan pendidikan sikap, perilaku, dan keagamaan belum terpenuhi dengan terlaksananya ketiga kegiatan dalam program penanganan.

#### 6. Ketepatan

Kegiatan yang dilaksanakan dinilai sudah sesuai dan cukup baik. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari program ini adalah mengurangi anak untuk tidak beraktivitas di jalan. Kondisi anak jalanan juga sudah sedikit berubah, walaupun dari hal kecil, yaitu adanya perubahan pola pikir untuk berubah dengan tidak lagi menjadi anak jalanan. Setelah kegiatan pelatihan perbengkelan juga terdapat anak yang akhirnya diterima magang di sebuah bengkel kecil atas

rujukan dari ketua RPSA Pelangi dengan kemampuan dasar yang telah dimiliki selama mendapatkan pelatihan.

#### b. Hambatan Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga melalui RPSA Pelangi

*Pertama*, komitmen RPSA dan dari Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga terhadap program penanganan anak jalanan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), sehingga tidak ada tindak lanjut setelah program selesai dilaksanakan.

*Kedua*, banyak komponen kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu identifikasi/*problem assessment*, bimbingan motivasi untuk orang tua, pemberdayaan orang tua, pendampingan usaha orang tua, reunifikasi, bantuan kesehatan, sosialisasi dan rekreasi, serta konsultasi dan tutorial anak dan orangtua.

*Ketiga*, hubungan komunikasi yang tidak baik antara anak jalanan dan dari Disospora sendiri yang mengakibatkan timbulnya rasa saling tidak percaya. *Keempat*, kegiatan

yang dilaksanakan dari program penanganan anak jalanan ini tidak bisa diikuti oleh seluruh anak jalanan binaan RPSA dimana anak jalanan sendiri terdiri dari anak usia enam hingga delapan belas tahun.

*Kelima*, hubungan kerjasama antara Disospora Kota Semarang dengan lembaga sosial ataupun pemerintah lainnya khusus untuk penanganan anak jalanan yang sangat kurang. *Keenam*, tidak adanya pendampingan dan kegiatan lanjutan secara berkala setelah program selesai dilaksanakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Hasil Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga melalui RPSA Pelangi

Secara keseluruhan dengan banyaknya penilaian yang belum baik pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, peneliti menyimpulkan bahwa program penanganan anak jalanan oleh Disospora melalui pendekatan RPSA Pelangi ini belum optimal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan tidak membuat anak jalanan berhenti beraktivitas di jalan.

Jumlah pegawai dan kepengurusan dalam program penanganan anak jalanan belum tercukupi. Begitu pula dengan sarana dan prasarana yang belum optimal. Usaha dalam pemenuhan komponen penanganan anak jalanan yang telah dilakukan oleh Disospora juga hanya pada kegiatan rehabilitasi dan pembinaan.

Program penanganan anak jalanan ini juga belum memenuhi kriteria kecukupan dimana hasil dari program belum mampu memecahkan permasalahan anak jalanan. Pencapaian pemerataan juga masih belum optimal dilihat dari tidak terserapnya seluruh anak jalanan binaan RPSA Pelangi untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Disospora Kota Semarang.

Pada kriteria responsivitas, program penanganan anak jalanan ini dinilai belum baik, dimana kebutuhan anak jalanan akan pendidikan sikap, perilaku, dan keagamaan belum terpenuhi dengan

terlaksananya ketiga kegiatan dalam program penanganan.

Kemudian kriteia yang terakhir adalah ketepatan, dimana kegiatan yang dilaksanakan dinilai sudah sesuai dan cukup baik. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari program ini adalah mengurangi anak untuk tidak beraktivitas di jalan. Kondisi anak jalanan juga sudah sedikit berubah, walaupun dari hal kecil, yaitu adanya perubahan pola pikir untuk berubah dengan tidak lagi menjadi anak jalanan.

## 2. Hambatan Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga melalui RPSA Pelangi

- a. Tidak ada tindak lanjut setelah program selesai dilaksanakan.
- b. Tujuan yang baik belum dibarengi dengan usaha yang maksimal.
- c. Hubungan komunikasi yang tidak baik antara anak jalanan dan dari Disospora.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan dari program penanganan anak jalanan ini tidak bisa

diikuti oleh seluruh anak jalanan binaan RPSA.

- e. Hubungan Kerjasama antara Disospora dengan lembaga sosial ataupun pemerintah lainnya yang sangat kurang.
- f. Tidak adanya pendampingan dan kegiatan secara berkala setelah program selesai dilaksanakan.

## Rekomendasi

1. Adanya pendampingan lanjutan meski kegiatan selesai dilaksanakan.
2. Pemenuhan komponen kegiatan selain rehabilitasi dan pembinaan.
3. Adanya kegiatan pemenuhan dasar.
4. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga diharapkan menyediakan kegiatan pelayanan rujukan.
5. Pembentukan tim koordinasi yang lebih lengkap.
6. Kegiatan yang telah terlaksana sebaiknya dijalankan secara berkala.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 2007. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Shalahuddin, Odi. 2004. *Dibawah Bayang-bayang Ancaman*. Semarang: Yayasan Setara.

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Anak*. 2005. Jakarta: CV Nario Sari.